

Pendidikan Kewarganegaraan
Matana University

Pertemuan 9

Demokrasi



Althien John P, M.Phil

Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

- Apa itu demokrasi?
- berasal dari penggalan kata bahasa
- Yunani yakni *demos* dan *kratos/cratein*.
- *Demos* berarti rakyat



Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

- *Kratos/cratein* berarti pemerintahan.
- Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat.
- Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863
 - Ia mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).



Demokrasi Indonesia

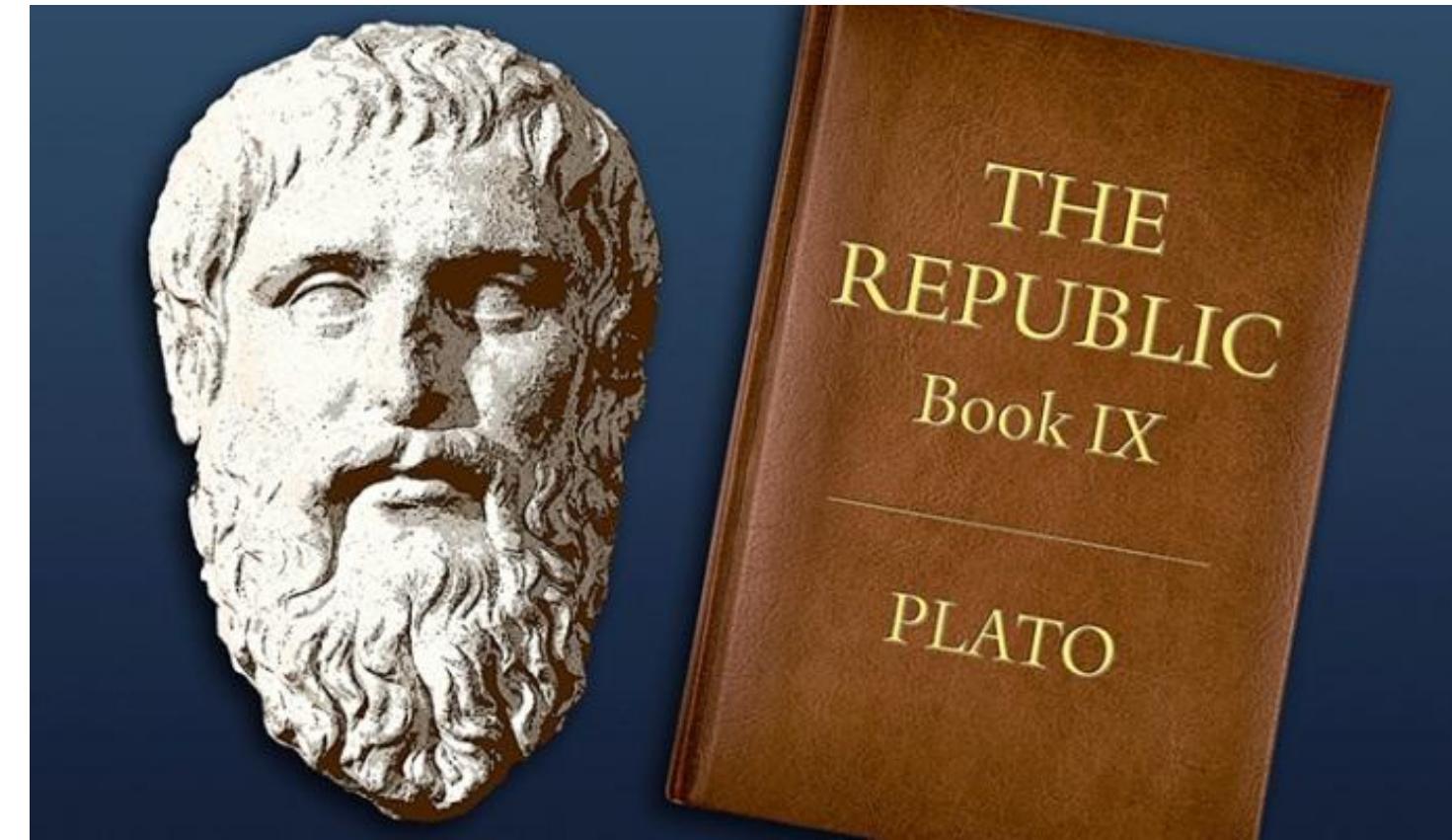
A. Pengertian Demokrasi

- Tiga Makna Demokrasi:

I. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para filsuf, seperti Plato dan Aristoteles.

- Plato dalam tulisannya “*Republic*” □ tiga bentuk pemerintahan yang baik □ **monarki, aristokrasi, dan demokrasi.**
- Demokrasi adalah satu-satu dari tiga bentuk pemerintahan ideal.
- Pembeda ketiga bentuk pemerintahan tersebut, adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.



Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

- Plato dalam *Republic*
- Demokrasi** adalah suatu bentuk pemerintahan, yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- Monarki** adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi (raja) dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- Aristokrasi** adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni **tirani**, **oligarki** dan **mobokrasi** atau **okhlokrasi**.

Number of rulers	Ideal	Perverted
One	Monarchy	Tyranny
Few	Aristocracy	Oligarchy
Many	Democracy	Mobocracy

Number of
rulers

Ideal

Perverted

One

Monarchy

Tyranny

Few

Aristocracy

Oligarchy

Many

Democracy

Mobocracy

Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

- Plato dalam *Republic*:
- Tirani** adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
- Oligarki** adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
- Mobokrasi/okhlokrasi** adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, yang tidak tahu apa-apa, tentang seluk-beluk pemerintahan.
- Akibatnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak.
- Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki (kondisi tanpa pemerintahan yang diakui).
- Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang penuh kekacauan.

Number of Rulers	Ideal	Perverted
One	Monarchy	Tyranny
Few	Aristocracy	Oligarchy
Many	Democracy	Mob Rule

Demokrasi Indonesia



- Tiga bentuk sistem pemerintahan demokratis dalam tataran makro:

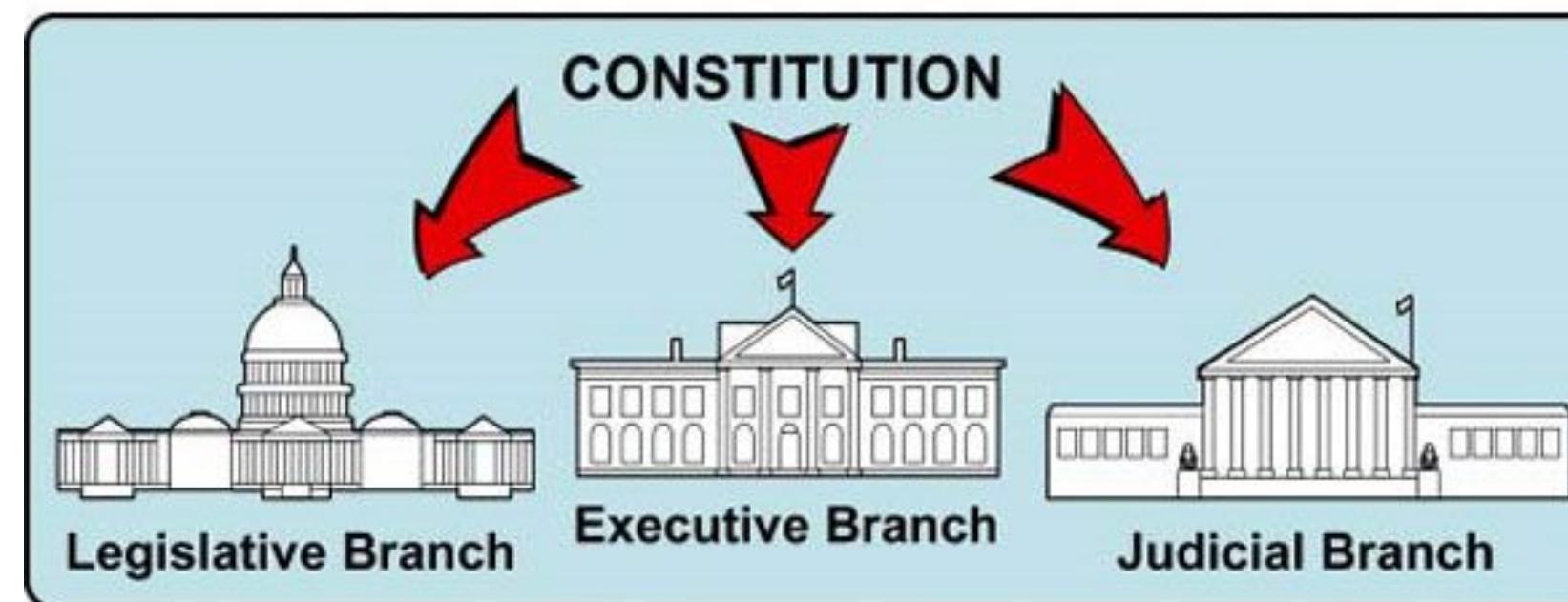
I. Sistem Parlementer

- Hubungan antara badan legislatif dan eksekutif , sifatnya adalah saling mempengaruhi secara politik
- legislatif bisa mengajukan mosi tidak percaya, jika menolak kebijakan eksekutif
- Mosi tidak percaya, mengakibatkan para menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, harus mundur
- Sebaliknya perdana menteri (eksekutif), bisa membubarkan parlemen, jika sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Demokrasi Indonesia

II. Sistem Trias Politica (Pemisahan Kekuasaan)

- ☐ Kekuasaan negara diselenggarakan oleh tiga lembaga yang terpisah, tujuannya adalah supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan
- ☐ Lembaga-lembaga tersebut adalah ☐Legislatif (pembuat undang-undang), Eksekutif (pelaksana undang-undang), Yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang)



Demokrasi Indonesia

III. Sistem Referendum

- Harfiah ☐ penentuan pendapat langsung oleh rakyat, untuk menentukan pendapat umum rakyat
- Eksekutif hanya badan pekerja Legislatif, referendum digunakan sebagai kontrol langsung rakyat atas legislatif.



Demokrasi Indonesia

- Konsep Demokrasi Indonesia dalam Pancasila
- Indonesia termasuk ke dalam sistem pemerintahan demokratis yang mana?
- Sila ke-4, Pancasila : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan”
- Indonesia menganut sistem trias politica, tapi tidak sepenuhnya
- Keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat



Demokrasi Indonesia

- Asas perwakilan, adalah rakyat tidak menyampa aspirasinya secara langsung, tetapi melalui bada perwakilan (Legislatif)
- Bukan sistem pemisahan kekuasaan, melainkan sistem pembagian kekuasaan
- Tiga badan penyelenggara kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), masih bisa saling memengai dengan ini *check and balance* diharapkan dapat berlangsung dengan baik
- Refendum untuk mengubah UUD 1945, juga masih mungkin dilakukan, landasannya adalah TAP MPR No. IV/MPR/1983)



Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

□ Tiga Makna Demokrasi:

II. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

- Demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi , oligarki, monarki atau yang lainnya.
- Bentuk pemerintahan, dewasa ini lebih banyak menganut pendapat Niccolo Machiavelli (1467-1527) □ Negara (*Lo Stato*) dalam hal ini merupakan hal yang pokok (*genus*) sedang spsesiesnya adalah Republik (*Res publica*) dan Monarki (*Principati*).
- Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan □ Pemimpin negara □ bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.
- Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh □ seorang presiden atau perdana menteri.



Demokrasi Indonesia



A. Pengertian Demokrasi

- Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau
- penunjukkan pemimpin negara.
- Apabila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya □monarki.
- Bila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.
- Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara.

Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

□ Prinsip-Prinsip dari sistem politik demokrasi:

- i. Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda
 - ii. Pemerintahan konstitusional
 - iii. Pemerintahan berdasarkan hukum
 - iv. Pemerintahan mayoritas
 - v. Pemerintahan dengan diskusi (musyawarah)
 - vi. Pemilihan umum yang bebas



Demokrasi Indonesia



- i. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
 - ii. Manajemen yang terbuka
 - iii. Pers yang bebas
 - iv. Pengakuan terhadap hak minoritas
 - v. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
 - vi. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
 - vii. Pengawasan terhadap administrasi negara

Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

□ Prinsip-Prinsip dari sistem politik demokrasi:

- XIV. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah
- XV. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun
- XVI. Penempatan pejabat pemerintahan dengan **merit** sistem (jenjang karir).
- XVII. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi
- XVIII. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
- XIX. Konstitusi/ UUD yang demokratis
- XX. Prinsip persetujuan





Alasan Indonesia disebut Negara Demokrasi

Cita-cita Etis Keinginan Bersama

- Merdeka**
- Berdaulat**
- Kesejahteraan**
- kemakmuran**
- Keadilan**
- Perdamaian**



Alasan Indonesia disebut Negara Demokrasi

- Alasan Sosiologis Keluar dari Kolonialisme
 - Konsensus Berbangsa
 - Pluralitas (keberagaman) / Multikulturalisme



Yuridis UUD 1945

- 1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
- Pasal 2 – 22 Yudikatif, legistlatif, Eksekutif (Pusat-Daerah)



Indikator Demokrasi

1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekrutmen politik yang terbuka
4. Pemilihan umum
5. Pemenuhan hak-hak dasar